



Subag Humas dan TU
BPK Pwk. Prov. Sulawesi Tengah

Tahun :

2	0	1	7
---	---	---	---

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Entitas :

Provinsi	Palu	Donggala	Tolitoli	Buol	Sigi	Morowali Utara	Parigi Moutong	Poso	Morowali	Tojo Una-una	Banggai	Banggai Kepulauan	Banggai Laut
----------	------	----------	----------	------	------	----------------	----------------	------	----------	--------------	---------	-------------------	--------------

Buol Peroleh WTP dari BPK



SULTENG RAYA – Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Tengah (Sulteng) memberikan opsi Wajar Tanpa Pengecualan (WTP) kepada Bupati Buol berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2016.

Pemberian penghargaan WTP kepada Bupati Buol dilaksanakan pada penyelenggaraan penyerahan LHP LKPD di kantor BPK RI Perwakilan Sulteng, Senin (5/6/2017).

Dalam penyelenggaraan tersebut, dihadiri oleh empat Pemrintah Kabupaten (Pemkab), yakni Pemkab Buol, Sigi, Morowali Utara dan Banggai Kepulauan. Keempat Pemkab tersebut, diwakili oleh Bupati dan unsur pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPKD).

Sesuai hasil pemeriksaan LHP LKPD, BPK RI

Perwakilan Sulteng menyimpulkan bahwa keempat Pemkab dalam pengelolaan aset tetap dan pengelolaan dana BGS masih belum tertib serta ada indikasi ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga mengakibatkan indikasi kerugian daerah.

Adapun temuan ketidakpatuhan dari empat entitas Pemkab adalah Kabupaten Sigi, dengan temuan Rp7,6 Miliar lebih dan telah dilakukan pengembalian sebesar Rp5,3 Miliar lebih. Sehingga, sisa temuan yang dikembalikan Rp2,3 Miliar lebih.

Kabupaten Morowali Utara dengan temuan Rp3,1 Miliar lebih dan telah dikembalikan ke kas daerah sebesar Rp251 juta lebih. Sehingga, sisa temuan yang belum dikembalikan sebesar Rp2,9 Miliar lebih.

Penerima WTP Kabupaten Buol dengan temuan

yang paling sedikit diantara empat kabupaten yang diperiksa oleh BPK RI Perwakilan Sulteng. Adapun temuan ketidakpatuhan di Kabupaten Buol adalah Rp1,1 Miliar dan telah dikembalikan ke kas daerah sebesar Rp752 juta lebih. Dan sisa yang belum dikembalikan tinggal Rp425 juta lebih.

Sehingga sebagai entitas temuan ketidakpatuhan yang paling tinggi adalah Kabupaten Banggai Kepulauan dengan temuan Rp5,9 Miliar dan baru dikembalikan ke kas daerah sebesar Rp101 juta lebih. Sehingga, sisa temuan yang belum dikembalikan sebesar Rp5,8 Miliar lebih.

Dalam kesempatan itu, Kepala BPK RI Perwakilan Sulteng M. Bayu Sabartha sangat mengapresiasi terhadap capaian yang dilakukan oleh Pemkab Buol.

"Perjalanan Pemkab Buol untuk mendapatkan WTP

BPK Sulteng S